

KONSEP DISTRIBUSI DAN BASE VALUE SISTEM EKONOMI ISLAM

St. Samsuduha

Universitas Muslim Indonesia
samsuduha1967@gmail.com

Abstract

This paper reviews the concept of distribution and the base value of the Islamic economic system. These two themes are interrelated discourses with one another. As understood, the Islamic economic system aspires to an economic order that is just and beneficial for human life. Therefore, distribution as one of the market instruments in the economic world must effectively take place in the corridor of positive and fair values. The results of the study in this paper concluded that; First, distribution in economic studies is a system of distributing goods and services from producers to consumers. This process is a stage that takes place to synchronize the stages of production of goods with sales. Distribution is an important aspect that determines the adequacy of goods needs in the community. Therefore, the balance can be maximized through the selection of distribution channels in an effective, fair and sustainable manner. Second, the Islamic economic system provides a basic value formulation that can be used as a benchmark in the distribution process. Thus, the distribution made must be in line with the basic value of ownership; the basic value of freedom; basic values of justice; basic value of balance; and the value of togetherness.

Key Word: Distribution, Islamic Economic System

Abstrak

Tulisan ini mengulas tentang konsep distribusi dan base value sistem ekonomi Islam. Dua tema ini merupakan diskursus yang saling bertemali antara satu dengan yang lain. Seperti dipahami, sistem ekonomi Islam mencita-citakan tatanan ekonomi yang berkeadilan dan bermaslahat bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, distribusi sebagai salah satu piranti pasar dalam dunia ekonomi harus secara efektif berlangsung dalam koridor nilai-nilai yang positif dan berkeadilan. Hasil kajian dalam penulisan ini diperoleh kesimpulan bahwa; Pertama, distribusi dalam kajian ekonomi merupakan sistem penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumennya. Proses ini merupakan tahapan yang berlangsung untuk menyingkronkan tahapan produksi barang dengan penjualannya. Distribusi merupakan aspek penting yang menentukan ketercukupan kebutuhan barang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kesimbangannya dapat dimaksimalkan melalui pemilihan saluran distribusi secara efektif, adil, dan berkesinambungan. Kedua, sistem ekonomi Islam memberikan rumusan nilai dasar yang dapat dijadikan patokan dalam proses distribusi. Dengan demikian, distribusi yang dilakukan haruslah sejalan dengan nilai dasar kepemilikan; nilai dasar kebebasan; nilai dasar keadilan; nilai dasar keseimbangan; dan nilai kebersamaan.

Kata Kunci: Distribusi, Sistem Ekonomi Islam

Pendahuluan

Distribusi menjadi salah satu diskursus dalam ilmu ekonomi yang secara umum berkaitan dengan barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan umat manusia di dunia. Sebagai salah satu instrumen penting penyebaran barang dan jasa, proses distribusi menjadi elemen penting khususnya dalam aktivitas perekonomian. Distribusi menjadi perantara atau menduduki posisi tengahan antara proses produksi dan konsumsi.

Suatu barang hasil produksi harus melalui tahapan distribusi untuk sampai kepada konsumennya. Dengan istilah lain jika tidak ada distribusi maka proses konsumsi akan

terganggu secara signifikan. Barang haruslah sampai ke tangan konsumen melalui distribusi secara maksimal untuk menghindari penumpukan kebutuhan atau kelangkaan barang di tengah umat.

Realitas sosial ekonomi menunjukkan bahwa terkadang terjadi kelangkaan barang di tengah umat. Hal ini tentunya berkaitan dengan aspek produksi yang terkadang terjadi penimbunan karena distributor barang bersikap tidak adil untuk mengejar keuntungan modal yang lebih besar. Islam menentang keras praktik yang tidak adil dalam ekonomi semacam ini karena telah ditentukan standar yang bersifat maslahat secara universal, misalnya dengan mewujudkan keadilan dalam distribusi harta dalam kehidupan masyarakat maupun tanggungjawab secara individu.

Umat dapat sejahtera sangat tergantung pada model sistem ekonomi yang dianut oleh suatu bangsa. Sistem ekonomi liberal yang cenderung berorientasi kapital tidak memberikan keseimbangan yang mumpuni bagi masalah ekonomi. Persaingan bebas akan terjadi sehingga terkadang setiap orang menghalalkan segala cara, termasuk salah satunya adalah monopoli sektor distribusi. Berbeda dengan proses tersebut, Islam justru menawarkan konsepsi distribusi secara berkeadilan karena hal ini berkaitan dengan moralitas ekonomi yang berkeadilan dan berkeimbangan secara individual maupun dalam konteks komunitas pemodal dalam dunia ekonomi.

Sejalan dengan ulasan tentang moralitas ekonomi tersebut, Noor (2013: 80) menjelaskan bahwa Islam menekankan kegiatan perekonomian yang saling memberikan keuntungan. Oleh karena itu, mencari keuntungan yang merugikan orang lain merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai Islam. Dalam Islam terdapat istilah *gharar* baik dalam transaksi maupun kegiatan ekonomi lainnya akan hanya akan merusak keseimbangan pasar yang adil. Dengan demikian, setiap individu harus memahami nilai-nilai ekonomis yang dirumuskan dalam Islam sebagai instrumen pemahaman melakukan praktik ekonomi yang lebih bermaslahat.

Salah satu aspek pemahaman tersebut yaitu berkaitan dengan konsep distribusi yang sangat penting dikomparasikan dengan *base value* atau nilai dasar yang menjadi acuan dalam sistem ekonomi Islam. Sejalan dengan hal ini, (Sudarsono, 2004: 234) mengemukakan bahwa distribusi merupakan bidang penting dalam kajian perekonomian. Pembahasan distribusi dalam kerangka teori ekonomi mikro, baik itu dalam ekonomi Islam maupun sistem kapitalis, memberikan porsi kajian karena umumnya aspek distribusi tidak hanya berkaitan dengan

perekonomian semata namun juga berkaitan dengan dimensi sosial politik sehingga sangat mengundang perhatian pemikir ekonomi Islam.

Distribusi yang baik akan dikenali melalui karakteristiknya yang dilakukan secara adil dan jujur. Islam sangat terkoneksi dengan landasan moralitas tersebut karena Islam menjadikan dua sikap itu sebagai nilai dasar dalam sistem ekonomi Islam. Aspek nilai dasar lainnya mencakup nilai kebersamaan dan keseimbangan sehingga proses distribusi haruslah berjalan secara efektif. Dinamika kebersamaan haruslah terbangun karena distribusi merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan pelibatan dan kerjasama banyak orang di seluruh dunia. Hilangnya keseimbangan akan mengganggu koneksitas banyak individu yang tentunya dapat berdampak konflik dan kerugian.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kajian berkaitan dengan konsep distribusi dan *base value* sistem ekonomi Islam penting dilakukan untuk menelaah data literatur yang berkaitan dengan dua topik tersebut dalam penulisan ini dengan menggunakan pendekatan kajian kepustakaan (*library research*).

Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan di atas, rumusan masalah penulisan ini adalah “Bagaimana konsep distribusi dan *base value* sistem ekonomi Islam?”

Pembahasan

1. Konsep Distribusi

Distribusi secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan proses pemasaran. Kegiatan pada tahapan ini diharapkan memperlancar penyediaan barang dan jasa atau dapat pula dipahami sebagai proses pemindahan bahan produksi dari produsen untuk menjangkau kebutuhan konsumen. Saat ini, kegiatan distribusi berjalan secara masif di dunia. Hal ini dapat diamati di Indonesia bahwa proses distribusi ini juga dilakukan di dalam negeri menggunakan Jalur Tol Laut yang menjadi koneksi antar pulau di Indonesia.

Defenisi distribusi dapat dilihat dalam KBBI (Anwar, 2001: 125) distribusi diartikan sebagai pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat. Dengan demikian, distribusi menjadi perantara antara produsen dengan konsumen dan penghubungan banyak tempat yang tersebar.

Azis (2008: 86) mengemukakan bahwa arus barang atau jasa dapat diperlancar dari produsen kepada konsumen dengan memilih secara tepat dan efektif saluran distribusi. Penggunaan istilah saluran distribusi terkadang pula disebut sebagai saluran pemasaran dan

saluran perdagangan, sehingga defenisinya terkadang dirumuskan secara sempit maupun secara luas berdasarkan sudut pandang banyak penulis atau pemikir. Selanjutnya, Kotler (Aziz, 2008: 87) menjelaskan bahwa distribusi tidak lain sebagai himpunan perusahaan maupun perseorangan yang pada praktiknya mengambil alih hak maupun membantu mengalihkan hak atas barang dan jasa dari produsen kepada konsumen.

Distribusi memiliki makna yang lebih luas dalam paradigma ekonomi Islam yang mengkonstruksi distribusi sebagai proses yang meliputi pengaturan hak milik, unsur produksi dan sumber kekayaan. Cakupan tersebutlah yang menjadikan distribusi sebagai salah satu masalah serius dan yang utama dalam praktik ekonomi Islam. Aspek distribusi berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur dengan pemenuhan kebutuhan setiap individu masyarakat. Dengan demikian Islam memandang distribusi bukan atas dasar penawaran dan permintaan, cadangan devisa, nilai mata uang, dan indeks berbagai harga sebagaimana halnya dalam sistem ekonomi kapitalisme (An-Nabhani, 2004: 16)

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa distribusi merupakan aspek pokok yang sangat strategi dalam ilmu ekonomi. Islam memandang distribusi sebagai suatu proses mensejahterahkan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan individu masyarakat. Distribusi menjadi perantara antara produsen dengan konsumen maupun pengantara antara berbagai tempat yang terpisah. Distribusi harus menjangkau semua lapisan masyarakat melalui penyediaan kebutuhan sehingga tercipta keseimbangan sosial.

a. Jenis dan Fungsi Distribusi

Sopiah dan Syihabudhin (2008: 128) mengemukakan beberapa jenis distribusi dilihat dari segi rantai prosesnya, sebagai berikut.

Pertama, distribusi langsung. Jenis distribusi ini merupakan pemindahan langsung barang dari produsen ke pelanggan.

Kedua, distribusi primer. Proses jenis distribusi ini melalui pemindahan barang yang dilakukan oleh produsen ke gedung barang yang tersedia sebagai titik perantara.

Ketiga, distribusi sekunder. Prosesnya merupakan pemindahan barang dari gudang perantara ke pelanggan. Jenis ini dapat dikatan sebagai kelanjutan dari jenis distribusi primer.

Ketiga jenis distribusi tersebut memainkan peranan masing-masing. Dilihat dari aspek fungsinya, distribusi dapat dikategorikan menjadi dua bentuk yakni fungsi pokok dan fungsi tambahan sebagaimana dijelaskan oleh Assauri (2015: 20-25), sebagai berikut.

1) Fungsi Pokok Distribusi

Distribusi memiliki fungsi pokok meliputi pengangkutan, penjualan, pembelian, penyimpanan, pembakuan standar kualitas barang dan penanggung resiko. Beberapa fungsi pokok ini lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut.

- a) Pengangkutan. Jarak antara produsen dengan konsumen yang berbeda mengharuskan upaya pengangkutan barang dengan menggunakan transportasi untuk lebih mengefisienkan. Distribusi memiliki fungsi pengangkutan untuk memindahkan barang kepada konsumen.
- b) Penjualan (*selling*). Penjualan selalu dilakukan oleh produsen sebagai suatu proses pengalihan hak atas suatu barang sehingga konsumen dapat menggunakan barang tersebut.
- c) Pembelian (*buying*). Proses pengalihan hak tersebut haruslah melalui pembelian yang dilakukan oleh konsumen sebagai individu yang membutuhkan barang dari produsen atau pemilik barang.
- d) Penyimpanan (*strooring*). Barang yang akan disalurkan seperti biasanya akan disimpan terlebih dahulu untuk menjamin kesinambungan dan keselamatan serta keutuhan barang. Penyimpanan atau penggudangan juga membantu menjaga kualitas barang sehingga tidak mudah rusak.
- e) Pembakuan standar kualitas barang. Standar ketentuan mutu, jenis dan ukuran barang merupakan hal penting yang selalu diperhatikan baik oleh produsen maupun konsumen. Sehingga ukuran standar barang dan kualitasnya haruslah sesuai dengan harapan.
- f) Penanggung resiko. Hal ini ditanggung oleh distributor atas berbagai resiko yang bersifat kerusakan maupun adanya penyusutan barang selama proses distribusi.

2) Fungsi Tambahan

Fungsi tambahan distribusi meliputi penyeleksian, pengemasan, dan pemberian informasi, sebagai berikut.

- a) Penyeleksian. Fungsi penyeleksian diperlukan dalam proses distribusi hasil produksi, apalagi hasil produksi yang dikumpulkan dari berbagai tempat atau pengusaha. Hal ini juga dimaksudkan untuk memastikan kondisi barang yang dikumpulkan sebelum didistribusikan.
- b) Pengemasan. Fungsi ini membantu melindungi kualitas barang dari kerusakan atau hilang selama proses pendistribusian. Dengan demikian, barang haruslah dikemas dengan baik untuk menghindari berbagai kemungkinan resiko kerugian.
- c) Memberi informasi. Informasi yang maksimal harus diberikan kepada setiap perwakilan sehingga konsumen dapat memperoleh informasi dari setiap perwakilan yang ada, bisa dilakukan melalui iklan.

b. Karakteristik Saluran Distribusi

Distribusi dapat diefektifkan melalui berbagai bentuk saluran distribusi. Saluran distribusi dapat memaksimalkan pendistribusian barang ke konsumen secara tepat waktu. Dengan demikian, karakteristik saluran distribusi dapat dipahami untuk menjadi acuan pengambilan kebijakan secara tepat menggunakan saluran secara tepat untuk menjamin kesinambungan penyediaan barang pada setiap titik mata rantai saluran.

Abdullah (2014: 225) mengemukakan bahwa saluran distribusi diperlukan karena perbedaan yang dapat menimbulkan kesenjangan antara produksi dan konsumsi. Selain itu, terdapat pula perbedaan jarak secara geografis dan sebaran konsumen di mana-mana. Kondisi tersebut menjadikan lembaga penyaluran berperan sangat penting dalam proses distribusi.

Pentingnya eksistensi saluran tersebut dapat dilihat dari segi fungsi saluran distribusi. Hamali (2016: 206) mengemukakan beberapa fungsi saluran distribusi sebagai berikut.

Pertama, fungsi transaksi. Saluran distribusi berperan dalam kegiatan komunikasi dengan calon pelanggan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan informasi manfaat maupun tawaran harga suatu barang yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Kedua, fungsi logistik. Saluran distribusi berfungsi sebagai lembaga logistik yang melakukan tahapan kegiatan penyortiran dan pengangkutan barang. Selain itu, dilakukan pula kegiatan penyimpanan untuk pemeliharaan kualitas dan perlindungan barang.

Ketiga, fungsi fasilitas. Penelitian dan pembiayaan dilakukan pada fungsi ini meliputi kegiatan mengumpulkan berbagai informasi simpul saluran dan pelanggan. Selain itu, pembiayaan juga dilakukan sebagai tahapan memastikan bahwa simpul saluran memiliki dana yang cukup sehingga mempermudah aliran barang yang terdistribusikan hingga sampai ke konsumen.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa saluran distribusi memiliki fungsi yang sangat penting yang menjadi penjalih seluruh elemen yang ada. Sejalan dengan hal ini (Wahjono, 2010: 228-229) menjelaskan bahwa saluran distribusi memiliki elemen-elemen vital seperti perantara seperti pengecer, pedagang grosir dan pedagang besar. Pengecer menjual barang yang diperoleh dari produsen secara langsung. Pedagang grosir menjual barang yang diperoleh dari produsen dalam skala besar. Sedangkan pedagang besar menjual hasil produksi produsen dengan kapasitas yang jauh lebih besar lagi.

c. Prinsip Moral dalam Distribusi

Proses distribusi dilandasi dengan moralitas sebagai acuan nilai keseimbangan dan keadilan. Qardhawi (1997: 252) mengemukakan beberapa nilai moral sebagai berikut.

Pertama, nilai kebebasan berlandaskan keyakinan kepadaNya. Nilai ini membuat seseorang beriman kepada Allah Swt jauh dari sifat merampas kebebasan orang lain. Tidak pula memiliki sifat memperdaya karena menghormati fitrah dan menjaga kemuliaan dirinya.

Kedua, hak milik pribadi. Hak milik dalam konteks ini berkaitan dengan kebebasan menentukan resiko dari apa yang dilakukan serta mendapatkan hasil keuntungan dari apa yang telah dilakukan.

Ketiga, warisan termasuk hak milik paling menonjol. Dalam warisan ini masalah individu, keluarga dan masyarakat sangat terjaga.

Keempat, nilai keadilan merupakan sikap tengahan yang meliputi prinsip-prinsip keadilan yaitu; (1) membedakan manusia sesuai dengan keahlian dan usahanya; (2) pemerataan kesempatan; (3) memenuhi hak-hak pekerja; (4) takaful (kesetiakawanan yang menyeluruh); (5) mendekatkan jurang perbedaan antara manusia.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa moralitas menjadi dasar penting yang mengarahkan distribusi berlangsung secara adil dan berkeseimbangan. Islam menawarkan prinsip moralitas semacam itu untuk kemaslahan produsen maupun konsumen. Afzalurrahman (1995: 79) mengemukakan bahwa Islam tidak membenarkan kepemilikan kekayaan lahiriah secara melampui batas. Untuk mengontrol hal tersebut, Islam mencegah penimbunan harta dengan memandang setiap individu membelanjakan hartanya demi kebaikan masyarakat.

2. Konsep Base Value Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam terarah pada pencapaian kualitas ekonomi berbasiskan pada nilai-nilai Islam seperti ketauhidan dan merujuk pada Al-Qur'an dan As Sunnah. Hal ini merupakan rujukan sekaligus pijakan fundamental dalam pemenuhan kebutuhan umat manusia. Sistem ekonomi Islam memastika kesempatan pemerolehan dan pemenuhan kebutuhan bagi semua orang sehingga mencegah adanya pemusatan barang yang dapat berdampak pada keseimbangan barang. Hal ini dapat dihindari apabila distribusi berjalan sesuai nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam untuk merawat stabilitas dan pertumbuhan.

Rahman (1995: 10) mengemukakan bahwa sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Dalam konteks beberapa hal tertentu merupakan pertentangan keduanya. Sistem ekonomi Islam memiliki nilai kebaikan yang ada pada sistem kapitalis dan sosialis, dan terbebas dari kelemahan kedua sistem tersebut. Relasi antara individu terjalin dalam spirit saling membantu dalam sistem ekonomi Islam. Dengan demikian, sistem ini memberikan ruang kemudahan bagi setiap individu dan memberikan landasan moralitas tanggungjawab kepada individu lainnya.

a. Prinsip Sistem Ekonomi Islam

Sejalan dengan penjelasan tersebut, Karim (Mundir, dkk, 2015: 141-145) mengemukakan bahwa ekonomi syariah merupakan bangunan yang bertumpu pada lima nilai universal dalam Islam. Kelima nilai universal tersebut meliputi; (1) nilai ketauhidan atau penghambaan hanya kepada Allah Swt; (2) nilai keadilan (*al-'adl*); (3) keteladanan Rasulullah Saw (*nubuwwah*); (4) kepemimpinan manusia sebagai khalifah di muka bumi; (5) berorientasi keakhiratan (*ma'ad*). Nilai-nilai universal ini dapat diterapkan secara konkrit oleh pelaku ekonomi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa nilai universal dalam Islam tersebut menumbuhkan prinsip-prinsip mulia dalam sistem ekonom seperti konsep kepemilikan majemuk (*multiple ownership*), kebebasan perilaku (*freedom of act*), dan keadilan sosial (*social justice*). Ketiga prinsip ini diuraikan sebagai berikut.

Pertama, prinsip *multiple ownership*. Sistem ekonomi Islam menegaskan kepemilikan hakiki hanya Allah Swt. Manusia memiliki segala sesuatu di duni hanya bersifat sementara. Atas semua kepemilikan tersebutlah manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.

Kedua, prinsip *freedom of act*. Sistem ekonomi Islam mengakui manusia menjadi entitas yang bebas dan mandiri. Hal ini diakui selama tidak mengganggu kebebasan individu lainnya. Hal ini secara alamiah dapat memberikan efek pada mekanisme pasar yang seimbang dalam transaksi perekonomian pasar.

Ketiga, prinsip *social justice*. Dalam hal ini terbangun kesadaran suka sama suka atau saling berterima sehingga menghindarkan perilaku zalim kepada yang lainnya. Dalam konteks tertentu pemerintah haruslah mengintervensi harga maupun pasar untuk menjamin keadilan sosial.

Sejalan dengan penjelasan tersebut di atas, Rivai dan Buchari (2009: 20) menjelaskan beberapa prinsip dasar sistem ekonomi Islam, sebagai berikut.

- 1) Kebebasan individu secara penuh untuk berpendapat dan mengambil keputusan selama tidak menyimpang dari syariat Islam. Prinsip ini tertuju pada pencapaian kesajahteraan masyarakat serta upaya menghindari kekacauan sosial.
- 2) Hak individual diakui dalam syariat Islam dalam hal hak atas harta selama tidak merugikan masyarakat lainnya.
- 3) Individu ekonomi yang berbeda potensi diakui dalam syariat Islam. Dengan demikian terbuka peluang bagi setiap orang untuk mengembangkan kemampuannya dalam aktivitas perekonomian. Islam memberikan dasar kaidah untuk menghindari monopoli kekayaan seseorang atas orang lain yang dapat mengabaikan kepentingan umum.
- 4) Islam mendorong terwujudnya tatanan masyarakat yang memiliki kesamaan ekonomi dan kesamaan sosial. Dengan demikian, kekayaan dalam suatu bangsa tidak bisa dimonopoli seseorang karena semua individu memiliki peluang yang sama.
- 5) Islam memberikan desain sistem yang baik tentang jaminan sosial tiap individu dalam masyarakat. Dengan demikian, setiap individu memiliki hak hidup layak dan manusiawi.
- 6) Islam menjadi instrumen efektif pencegahan konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil orang. Sehingga semua kekayaan yang diperoleh dianjurkan untuk diberikan pada masyarakat melalui mekanisme syariat yang telah ditentukan.
- 7) Secara tegas Islam sangat melarang penimbunan kekayaan. Hal ini dikarenakan dapat merusak sistem perekonomian umat. Dengan demikian, Islam akan memberikan seperangkat sanksi keras pada para pelaku yang melanggar ketentuan syariat.
- 8) Praktik yang asosial tidak ditoleransi dalam syariat Islam. Hal ini dikarenakan dapat merugikan masyarakat seperti prostitusi, pornografi, ekstasi, minuman keras dan perjudian, klub malam dan diskotik.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi Islam merupakan alternatif terbaik dalam sistem perekonomian dunia. Jika sistem distribusi berakar pada paradigma ideal dan prinsip sistem ekonomi Islam tersebut akan memberikan dampak positif pada dinamika perekonomian. Paradigma ideal dan prinsip ekonomi Islam yang telah dijelaskan tersebut tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai dasar ekonomi Islam secara umum.

b. Lima Base Value Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam bertumpu pada nilai dasar yang terkonstruksi secara ideal dan dapat menentukan kualitas aktivitas perekonomian, termasuk distribusi dalam dunia pasar. Anwar (2012: 115-118) mengemukakan lima nilai dasar ekonomi Islam meliputi; (1) nilai dasar kepemilikan; (2) nilai dasar kebebasan; (3) nilai dasar keadilan; (4) nilai dasar keseimbangan; dan (5) nilai kebersamaan. Kelima nilai dasar tersebut lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut.

1) Nilai Dasar Kepemilikan

Kepemilikan individual diakui dan sangat dilindungi dalam Islam. Selain itu, Islam juga mengakui kepemilikan masyarakat dan negara. Sifat kepemilikan ini tidak bersifat mutlak atau absolut. Dengan demikian, sifat kepemilikan tersebut bersifat relatif dalam artian segala kepemilikan tersebut di dalamnya ada amanah dan kepercayaan Allah Swt.

2) Nilai Dasar Kebebasan

Islam menghormati kebebasan namun dengan batasan tertentu yang digariskan dalam syariat. Sehingga hal ini jelaslah sangat berbeda dengan sistem ekonomi kapital yang cenderung memberikan kebebasan tanpa batasan sehingga melahirkan banyak monopoli karena terbangun pemikiran tidak ada yang bisa membatasi seseorang kecuali dirinya sendiri. Pemahaman semacam ini akan melahirkan kekacauan karena keseimbangan dirusak oleh persaingan bebas dengan segala cara.

3) Nilai Dasar Keadilan

Nilai dasar keadilan merupakan hak setiap orang. Tidak ada siapapun yang dapat melebihkan atau menguranginya karena hal ini merupakan kewenangan Allah Swt. Sejalan dengan hal ini, Antonio (2001: 16) menjelaskan bahwa konsep keadilan dalam Islam meliputi semua aspek termasuk dalam hal distribusi pendapatan dan kekayaan sebagai wujud keadilan ekonomi. Islam menghendaki individu dengan pendapatan sesuai amal dan karyanya.

4) Nilai Dasar Keseimbangan

Keseimbangan sangat ditekankan dalam Islam. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan keseimbangan perseorangan, namun juga menekankan keseimbangan dunia dan akhirat, jasmani rohani, keseimbangan akal dan rohani dan aspek lainnya dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, Islam melarang terjadinya akumulasi kekayaan pada segelintir orang. Jika distribusi bertumpu pada hal ini maka proses pendistribusian barang kepada

konsumen dan setiap saluran distribusi akan merata. Islam memandang kesenjangan kepemilikan individu dalam pemenuhan kebutuhan dapat menjadi ruang praktik keadilan hak orang lain.

5) Nilai Dasar Persaudaraan dan Kebersamaan

Islam menekankan kebersamaan sebagai indikator keberimanan individu. Oleh karena itu, seseorang yang tidak memelihara kebersamaan memungkinkan tidak beriman. Nilai dasar ini menunjukkan bahwa semua individu memiliki potensi yang sama di mata Allah Swt, Islam menawarkan solusi yang melampaui batas ras, etnik dan bahasa. Jika konsep distribusi bertumpu pada nilai dasar ini maka tidak ada ketidakadilan dalam hal distribusi barang. Saluran distribusi merupakan suatu jejaring persaudaraan melampaui batas ras dan etnik, bahkan agama. Hal ini ditekankan oleh Antonio (2001: 13) mengemukakan tujuan Islam ingin membentuk tatanan sosial secara solid sehingga setiap individu terikat dalam satu ikatan persaudaraan dan kasih sayang seperti halnya dalam suatu keluarga.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai dasar sistem ekonomi Islam merupakan pijakan ideal yang dapat dijadikan sebagai pedoman distribusi. Dua hal ini saling berkorelasi dengan tetap mengutamakan kemaslahatan dan kepentingan masyarakat umum. Islam sangat melarang praktik distributif yang sifatnya zalim dan meurgikan orang lain. Dengan demikian, dasar kepemilikan harus menjadikan seorang distributor memandang kepemilikannya bersifat relatif dan di dalamnya ada amanah untuk memberdayakan orang lain. Nilai dasar tersebut akan dapat menstimulus perilaku positif dalam distribusi secara baik dan bermaslahat bagi kepentingan bersama dan kepentingan umum.

Sistem ekonomi Islam, dengan demikian, merupakan sistem tersendiri yang membedakannya dengan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Bentuk distribusi dalam Islam pun berbeda dengan sistem distribusi lainnya. Islam memberikan solusi keseimbangan untuk mencapai aktivitas ekonomi secara bersama dan tentunya setiap aktivitas bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

Kesimpulan

Distribusi dalam kajian ekonomi merupakan sistem penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumennya. Proses ini merupakan tahapan yang berlangsung untuk menyingkronkan tahapan produksi barang dengan penjualannya. Distribusi merupakan aspek penting yang menentukan kecukupan kebutuhan barang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, keseimbangannya dapat dimaksimalkan melalui pemilihan saluran distribusi secara efektif,

adil, dan berkesinambungan. Sistem ekonomi Islam memberikan rumusan nilai dasar yang dapat dijadikan patokan dalam proses distribusi. Dengan demikian, distribusi yang dilakukan haruslah sejalan dengan nilai dasar kepemilikan; nilai dasar kebebasan; nilai dasar keadilan; nilai dasar keseimbangan; dan nilai kebersamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz. 2008. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Abdullah, Ma'ruf. 2014. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Afzalurrahman. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- an-Nabhani, Taqiyuddin. 2004. *Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, Penerjemah Hafizh Abdurrahman, *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2011. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, Abas. 2012. Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-Nilai Dasar, dan Instrumental. *Jurnal Al-Iqtishad*: Vol. IV, No. 1, Januari 2012.
- Anwar, Dessy. 2001. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Abditama.
- Assauri, Sofjan. 2015. *Manajemen Pemasaran Dasar Konsep dan Strategi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mundir, Ahmad dkk. 2015. *Perbandingan Sistem Ekonomi*. Surabaya: Kopertais IV Press.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. 2013. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, (terj. Soerojo dan Nastangin). Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Ridwan, Ahmad Hasan. 2013. *Manajemen Baitul Mal wat Tamwil*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rivai, Veithzal dan Buchari, Andi. 2009 *Islam economics Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi Solusi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudarsono, Heri. 2004. *Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Ekonisia UII.
- Sopiah dan Syihabudhin. 2008. *Manajemen Bisnis Ritel*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Qardawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Islam*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Wahjono, Sentot Imam. 2010. *Bisnis Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.